

Keputusan pemerintah berbasis laporan keuangan dalam perspektif politik anggaran

by I Putu Sudano

Submission date: 29-Jan-2020 10:34AM (UTC+0700)

Submission ID: 1248015987

File name: 3863-11615-1-SM.docx (101.27K)

Word count: 2311

Character count: 15545

Keputusan pemerintah berbasis laporan keuangan dalam perspektif politik anggaran

I Putu Sudano¹, Nyoman Sri Subawa²

^{1,2}Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana,

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

Jl. Waturenggong No.164 Denpasar, Bali

Email: radeaananda09@gmail.com ⁽¹⁾

shribawa@undiknas.ac.id ⁽²⁾

Abstract

This study aims to determine the extent uses of data and information that contain in the regional financial report (LPKD) is used in decision making by the Provincial Government of Bali in preparing the APBD. The research method used is a qualitative descriptive and is by comparing the concept of decision making for budgeting according to Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 concerning Regional Government with its application in the Provincial Government of Bali and the concept of decision making theory. Based on the results of the study it was found that the decision making in the preparation of the Bali Province APBD there were several weaknesses, including the lack of a link between the decision making in the preparation of the APBD of the local government financial reports. Also, the preparation of the Bali Provincial Government's APBD which is still based on Permendagri nomor 13 tahun 2016 concerning the evaluation of regional regulation designs, has not accommodated the performance and utilization of data, as well as information presented in the financial statements. Thus, the of information data in the regional government financial reports is not optimal as a decision for the preparation and design of the APBD.

Article Histori:

Submitted:

Review:

Editing:

Publish:

Keyword: Government decisions, financial statements, budget politics.

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. *Good governance* hanya dapat dicapai

melalui tiga pilar utama yaitu adanya transparansi dari pemerintah, partisipasi dari masyarakat, dan adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) penyelenggara pemerintahan atas pelaksanaan kegiatan. Salah satu bentuk pengaplikasian tiga pilar utama dari *good governance* adalah melalui penyusunan Anggaran.

APBD merupakan digunakan sebagai instrument kebijakan fiskal oleh Pemerintah Daerah. Jika terdapat selisih

antara anggaran¹ dengan realisasi dalam APBD maka, dapat dijadikan indikator untuk menunjukkan tingkat akurasi Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan dan realisasi APBD. Apabila semakin kecil selisih anggaran dengan realisasi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memperkirakan penerimaan dengan tepat dan penyerapan belanja yang baik. Pemerintah daerah dengan hak otonomi yang dimiliki, semestinya dapat memanfaatkan laporan keuangan pemerintah daerah (LPKD) untuk pengambilan keputusan secara optimal. Terutama pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan dan penganggaran dalam menyusun APBD.

Tujuan umum pelaporan keuangan daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk mewujudkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang ada. Kualitas laporan keuangan dan kecukupan data dan informasi serta ketepatan waktu dalam penyajian menjadi sangat penting, sehingga data dan informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam proses perencanaan dan penyusunan APBD.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana pemanfaatan data dan informasi yang ada pada LKPD dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. KAJIAN LITERATUR

Landasan teoritis untuk mendeskripsikan pengambilan keputusan adalah dari Simon dan Byre (2008) yakni merupakan suatu proses melalui kombinasi individu atau kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan. Menurut

Terry (2003) pengambilan keputusan ialah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu diantara alternatif yang memungkinkan.

Pengambilan keputusan meliputi empat tahap yang saling berhubungan dan berurutan. Empat proses tersebut ialah: Intelligence, Design, Choice dan Implementation (Simon, 1960).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

Moemahadi¹ Djanegara (2017) mendefinisikan laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka laporan keuangan yang disajikan mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports). Terdapat 7 komponen pokok LKPD yakni laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.

LKPD dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut (1) andal, (2) relevan, (3) dapat dipahami, dan (4) dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang

berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Proses penentuan besaran dan alokasi anggaran senantiasa sarat dengan kepentingan politik yang melibatkan berbagai aktor di dalamnya. Menurut Lindholm (1984, 2), aktor kebijakan publik terdiri atas warga negara biasa, pemimpin organisasi, anggota DPR, pemimpin lembaga legislatif, aktivis partai, pemimpin partai, hakim, pegawai negeri sipil, ahli teknik, dan manajer dunia usaha.

Rubin (2000:4) mendefinisikan politik penganggaran publik adalah pencerminan dari kekuatan relatif dari berbagai budget actors yang memiliki kepentingan atau preferensi berbeda terhadap outcomes anggaran. Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumberdaya. Sehingga, Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali. BPKAD Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui informan. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria khusus.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dan dari Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Informan eksternal yang digunakan peneliti adalah dari Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Denpasar dan dari Kantor Akuntan Publik/Konsultan/staf ahli DPRD Provinsi Bali.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Peneliti mempersiapkan panduan wawancara yang akan digunakan untuk menggali data pada informan. Data yang diperoleh diuji kembali untuk melihat keabsahan data dengan metode triangulasi data. Proses tersebut dilakukan hingga didapatkan data jenuh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaku-pelaku kunci yang terkait dalam penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi Bali adalah Pihak eksekutif mulai dari Kepala Daerah, Sekretaris daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Tahapan pengambilan keputusan yang terjadi Menurut Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah (Kabid PAD) pada BPKAD Provinsi Bali, bahwa pembangunan daerah termasuk perencanaan keuangan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu berupa dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan. Dari RPJPD kemudian diturunkan menjadi RPJMD memuat dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun.



Setiap ada pemilihan kepala daerah maka akan ada visi dan misi yang baru yang tetap mengacu kepada RPJPD. Dalam RPJMD turun menjadi visi, misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dieksekusi setiap tahun menjadi RKPD yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD ini menjadi sumber data untuk menyusun RAPBD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pos penjelasan dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni 1) Penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh. Hal ini sejalan dengan 4 tahapan pengambilan keputusan, meliputi empat tahap yang saling berhubungan dan berurutan yakni 1) Proses Intelligence; 2) Proses Design; 3) Proses Choice; dan 4) Proses Implementation. Rincian masing-masing tahapan tersebut disajikan dalam Tabel perbandingan sebagai berikut :

1. Proses Intelligence

Tabel 1. Perbandingan Tahapan Pengambilan Keputusan dalam Perumusan RKPD

Aktor dalam pengambilan keputusan	UU Nomor 23 Tahun 2014	Penerapan pada Pemerintah Provinsi Bali	Teori Tahapan Intelligence
Pemerintah Daerah dan DPRD	Rencana Strategis Daerah, Hasil Penjarangan Aspirasi masyarakat, Laporan Kinerja Historis, Pokok-pokok fikiran DPRD, Kebijakan Keuangan Daerah	Menetapkan target pendapatan melalui forum pendapatan daerah, Melaksanakan musrenbang oleh eksekutif (Renstra) Daerah. Penjarangan aspirasi oleh legislatif (pokir). Laporan Kinerja hirtoris, kebijakan keuangan.	Merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah.

Sumber: Hasil penelitian, 2019



2. Proses Design

Tabel 2. Perbandingan Tahapan Pengambilan Keputusan dalam Perumusan KUA

Aktor dalam pengambilan keputusan	UU Nomor 23 Tahun 2014	Penerapan pada Pemerintah Provinsi Bali	Teori Tahapan Design
Pemerintah Daerah	Perumusan Kebijakan Umum APBD dan menghasilkan berita acara kesepakatan	Perumusan Kebijakan Umum Anggaran APBD dan menghasilkan berita acara kesepakatan	Merupakan proses menemukan dan mengembangkan alternatif. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi dan menguji kelayakan solusi.

Sumber: Hasil penelitian, 2019

3. Proses Choice

Tabel 3. Perbandingan Tahapan Pengambilan Keputusan dalam Perumusan Petunjuk Teknis APBD

Aktor dalam pengambilan keputusan	UU Nomor 23 Tahun 2014	Penerapan pada Pemerintah Provinsi Bali	Teori Tahapan Design
TAPD	Membuat Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Unit ² erja berdasarkan Perda Pengelolaan Keuangan, KUA APBD, Strategi dan Prioritas APBD, Keputusan Kepala Daerah tentang SPM, tingkat Pencapaian Kinerja dan Standar Biaya	Membuat Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Unit ² erja berdasarkan Perda Pengelolaan Keuangan, KUA, Strategi dan Prioritas APBD, Keputusan Kepala Daerah tentang SPM, tingkat Pencapaian Kinerja dan Standar Biaya	³ Pada tahap ini dilakukan poses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Tahap ini meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi solusi yang sesuai untuk model yang telah dibuat. Solusi dari model merupakan nilai spesifik untuk variabel hasil pada alternatif yang dipilih.
SKPD	Membuat Pernyataan Anggaran berdasarkan Perda ttg Struktur Organisasi dan Tata Kerja	Membuat Pernyataan Anggaran berdasarkan Perda ttg Struktur Organisasi dan Tata Kerja	
	Membuat Pernyataan Anggaran berdasarkan Tujuan dan Sasaran Unit Kerja	Membuat Rencana Kerja SKPD berdasarkan Tujuan dan Sasaran Unit Kerja	
	Membuat Pernyataan Anggaran berdasarkan program unit kerja	Membuat RKA SKPD, RKA PPKD berdasarkan program unit kerja	

Sumber: Hasil penelitian, 2019



4. Proses Implementation

Tabel 4. Perbandingan Tahapan Pengambilan Keputusan dalam Perumusan Rancangan APBD

Aktor dalam pengambilan keputusan	UU Nomor 23 Tahun 2014	Penerapan pada Pemerintah Provinsi Bali	Teori Tahapan Implementation
Pemerintah Daerah dan TAPD	Membuat Rancangan Perda APBD berdasarkan Arah dan KUA, Strategi dan Prioritas APBD, Anggaran Daerah	Membuat Rancangan Perda APBD berdasarkan Arah dan KUA, Strategi dan Prioritas APBD, Anggaran Daerah.	Merupakan tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana,
Badan Anggaran dan TAPD	Membuat Perda APBD berdasarkan Rancangan Perda APBD	Membuat Perda APBD berdasarkan Rancangan Perda APBD	37 hingga hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan apabila diperlukan perbaikan.

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Pada tabel 1 dijelaskan terkait perbandingan tahapan pengambilan keputusan dalam perumusan RKPD. Pada tabel dapat dilihat tahapan pengambilan keputusan (Penyusunan RAPBD) menurut UU 23 Tahun 2014 pada dasarnya telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan sesuai dengan konsep teori pengambilan keputusan. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan antara lain dalam menentukan target pendapatan pemerintah daerah hanya melihat potensi daerah kedepan dan belum berupaya menggunakan berbagai metode melalui pendekatan realisasi sehingga target pendapatan belum mendekati riil. Disisi perencanaan belanja daerah, Pemerintah Provinsi Bali belum melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja dan sistem perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pemanfaatan laporan kinerja dalam sistem penganggaran belum maksimal. Pada tabel 2 dijelaskan terkait perbandingan tahapan pengambilan keputusan dalam perumusan KUA. Tahapan Penyusunan Anggaran menurut UU 23 Tahun 2014 telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan sesuai dengan konsep teori pengambilan keputusan. Namun dalam pembahasan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sering terjadi perdebatan karena adanya kepentingan kelompok dan golongan. Pembahasan KUA PPAS yang seharusnya mengacu pada RKPD yang sudah disepakati seringkali diingkari dengan berbagai alasan dan kepentingan kelompok masing-masing. Menurut informan yang penulis wawancarai yaitu staf ahli dewan (konsultan), lemahnya posisi tawar eksekutif terhadap legislatif

karena apa yang disampaikan eksekutif terhadap legislatif tidak berbasis data dan informasi yang memadai sehingga perdebatan antara eksekutif dengan legislatif dalam pembaharuan KUA PPAS tidak dapat dihindari.

Pada tabel 3 dijelaskan terkait perbandingan tahapan pengambilan keputusan dalam perumusan petunjuk teknis APBD. Pada tabel dapat dilihat tahapan pengambilan keputusan menurut UU 23 Tahun 2014 telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan sesuai dengan konsep teori pengambilan keputusan. Namun masih ditemukan kelemahan terutama belum memperhatikan poin-poin penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penyusunan RKA SKPD terutama pengklasifikasian kode rekening baik disisi pendapatan dan belanja belum mengakomodir beberapa temuan hasil pemeriksaan selama audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya. Sehingga temuan-temuan berulang atas kesalahan penganggaran baik disisi pendapatan maupun belanja sering terjadi.

Pada tabel 4 dijelaskan perbandingan tahapan pengambilan keputusan dalam perumusan rancangan APBD. Pada tabel dapat dilihat tahapan penyusunan APBD menurut UU 23 tahun 2014 telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan sesuai dengan konsep teori pengambilan keputusan. Namun masih ditemukan kelemahan seperti pada tahap verifikasi RKA-SKPD. Kesalahan yang ada pada RKA-SKPD sering kali lolos dari verifikasi. Disamping itu peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dilakukan oleh Inspektorat untuk mereview RAPBD juga belum maksimal.

19
Temuan lain didapatkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengambilan keputusan berbasis laporan keuangan dalam perspektif politik anggaran dari hasil wawancara dengan informan. Hasil penelitian akan dipaparkan pada penjelasan dibawah ini :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Pada tabel 5 di halaman 9 akan dipaparkan data hasil triangulasi data sumber permasalahan keterbatasan SDM. Data triangulasi data didapatkan dari hasil wawancara dengan informan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor keterbatasan SDM yang dimiliki menjadi permasalahan mendasar dalam penyusunan RAPBD, hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan (pelatihan) yang berkelanjutan sesuai perkembangan regulasi terkait penyusunan RAPBD yang sangat dinamis serta faktor penempatan SDM yang kurang memaksimalkan analisis jabatan.

2. Manajemen waktu yang tidak efektif dan sesuai *time table* kegiatan.

Berdasarkan hasil observasi didapatkan bahwa penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beririsan dengan penyusunan APBD yang sangat signifikan. Hal ini menyebabkan dalam penyusunan RAPBD tidak bisa menggunakan data 15 dan informasi terkini dari LKPD. Hasil ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa semua informan sepakat bahwa

manajemen waktu penetapan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan penyusunan RAPBD menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah untuk memperoleh data dan informasi terkini yang tersaji dalam LKPD untuk digunakan dalam penyusunan RAPBD.

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum digunakan sebagai acuan dalam alokasi anggaran

Berdasar pada paparan data pada hasil wawancara di dapatkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali belum menjadikan data dan informasi yang ada pada LKPD sebagai acuan dalam penentuan target pendapatan dan pengalokasian anggaran belanja daerah

4. Lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Hal ini dikarenakan keterbatasan personil yang dimiliki dan waktu yang sangat terbatas untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Disamping itu belum adanya mekanisme khusus untuk monitoring pelaksanaan atas catatan hasil *review* (CHR) dan belum terdapat sanksi untuk pemerintah yang tidak melaksanakan *review*. CHR hanya menjadi sebuah catatan 25 yang disampaikan kepada Direktorat jenderal bina pembangunan daerah kementerian dalam negeri dan tidak memiliki kepastian atas tindak lanjutnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh staf ahli DPRD bahwa peran APIP masih

sangat minim dalam penyusunan RAPBD.

5. Kurang Efektifnya evaluasi RAPBD yang dilakukan oleh Kemendagri
Evaluasi yang kurang efektif dikarenakan belum terdapat mekanisme khusus untuk monitoring pelaksanaan hasil evaluasi dan belum terdapat mekanisme sanksi yang jelas dan *ajeg* bagi para pelanggar atauran.

Tabel 5. Hasil triangulasi sumber Permasalahan Keterbatasan SDM

Permasalahan	Informan 1 (Kepala BPKAD)	Informan 2 (Kabid PAD)	Informan 3 (Konsultan)	Triangulasi hasil wawancara
Keterbatasan SDM	faktor SDM memang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah, pesatnya pernyempurnaan regulasi tidak diimbangi dengan pendidikan yang berkelanjutan terhadap SDM yang dimiliki	SDM memang menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah secara umum, analisis jabatan dan penempatan SDM tidak berjalan dengan baik.	Dari yang kami temui dilapangan sebagai konsultan yang mendampingi DPRD, sitem perencanaan kita memang belum maksimal, salah satu faktornya adalah SDM yang masih kurang terlatih.	SDM menjadi faktor kunci dalam penyusunan RAPBD yang disebabkan karena kurangnya pelatihan, mutasi yang tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan perubahan regulasi yang sangat dinamis.

Sumber: Hasil Penelitian, 2019



5. PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Bali belum menjadikan³¹ laporan keuangan sebagai instrumen dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah belum tersusun secara efektif. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala yakni keterbatasan SDM, manajemen waktu Penyusunan LKPD dengan penyusunan RAPBD, lemahnya fungsi pengawasan oleh APIP dan belum efektifnya evaluasi oleh Kemendagri. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut kedepan agar dapat melengkapi kekurangan⁶ dan keterbatasan data yang ada pada penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

¹⁶ Baron, R A dan Byrne, D. 2008. *Social Psychology*. Boston: Pearson Education.

Djanegara, Moermahadi S. ³⁵ 2017. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Teori, Praktik, dan Permasalahan. Yogyakarta: Kesatuan¹¹ Press.

Lindblom, C. E. (1984). *The policy making process, 2nd Edition*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

¹¹ Rubin, I. S. (1990). *The Politics of public budgeting: Getting and spending, borrowing and balancing*. New Jersey: Chatam House Publisher.

¹⁶ Simon, Herbert A. 1993. *Decision Making: Rational, Nonrational and Irrational*. *Jurnal Educational Administration Quarterly* Vol.29 No.3.

³⁴ Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif Cetakan keempat*. Bandung: CV. Alfabeta.

Terry, G. R. (1977). *Principles of Management* (8th ed.; R. D. Irwin, ed.). Washington, DC: Island Press.

¹ ----- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58;

----- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;

----- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;

¹⁴ ----- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165

----- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



Keputusan pemerintah berbasis laporan keuangan dalam perspektif politik anggaran

ORIGINALITY REPORT

39%

SIMILARITY INDEX

33%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

36%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	3%
3	id.scribd.com Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	2%
5	docplayer.info Internet Source	2%
6	adoc.tips Internet Source	2%
7	titin-stie.blogspot.com Internet Source	1%
8	ejournal.lipi.go.id Internet Source	1%
9	Submitted to Udayana University	

Student Paper

1%

10

blog.umy.ac.id

Internet Source

1%

11

jmi.ipsk.lipi.go.id

Internet Source

1%

12

bpkad.baliprov.go.id

Internet Source

1%

13

Submitted to Colorado Technical University
Online

Student Paper

1%

14

hukum.cilacapkab.go.id

Internet Source

1%

15

media.neliti.com

Internet Source

1%

16

tamimimitran.blogspot.com

Internet Source

1%

17

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Student Paper

1%

18

pt.scribd.com

Internet Source

1%

19

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia

1%

20 www.unud.ac.id 1 %
Internet Source

21 akkeyme.blogspot.com 1 %
Internet Source

22 Submitted to Universitas Negeri Makassar 1 %
Student Paper

23 sugengrusmiwari.blogspot.com 1 %
Internet Source

24 vdocuments.site 1 %
Internet Source

25 es.scribd.com 1 %
Internet Source

26 bkppdbitungkota.id 1 %
Internet Source

27 journals.ums.ac.id <1 %
Internet Source

28 Submitted to Universitas Muria Kudus <1 %
Student Paper

29 akbarmekuo.blogspot.com <1 %
Internet Source

30 jurnalmahasiswa.unesa.ac.id <1 %
Internet Source

31	zombiedoc.com Internet Source	<1%
32	Submitted to Binus University International Student Paper	<1%
33	imajeri.uhamka.ac.id Internet Source	<1%
34	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1%
35	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
36	Submitted to University of Birmingham Student Paper	<1%
37	dwisriyanti.blogspot.com Internet Source	<1%
38	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
39	id.123dok.com Internet Source	<1%
40	docshare.tips Internet Source	<1%
41	www.lppm.unmer.ac.id Internet Source	<1%
42	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1%

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off